

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari studi mengenai kapital sosial serta persaingan untuk mendapatkan kesempatan dalam proses seleksi calon anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dilaksanakan di Cipinang, Jakarta Timur, disimpulkan bahwa tahapan seleksi tidak sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme administratif yang objektif dan hanya mempertimbangkan prestasi, tetapi juga merupakan tempat sosial yang dipengaruhi oleh sebaran kapital sosial di antara para peserta.

Pertama, ada berbagai bentuk kapital sosial yang dimiliki dan digunakan oleh para peserta seleksi. Kapital sosial ini muncul dalam bentuk jaringan keluarga, termasuk hubungan dengan anggota kepolisian aktif serta pensiunan, kedekatan dengan tokoh masyarakat, hubungan persahabatan yang strategis, dan akses terhadap informasi tidak resmi tentang tahapan dan cara menghadapi seleksi. Bagi peserta dari keluarga yang memiliki latar belakang kepolisian, kapital sosial tidak hanya berupa jaringan relasional, tetapi juga mencakup pemahaman tentang budaya institusi yang telah mereka serap sejak kecil. Di sisi lain, peserta dari keluarga non-polisi berusaha membangun kapital sosial melalui relasi dengan teman-teman, bergabung dalam komunitas, atau melalui koneksi tak langsung dengan pihak kepolisian.

Kedua, kapital sosial memainkan peran penting dalam memberikan akses, dukungan, dan peluang yang bervariasi bagi peserta seleksi. Akses terhadap informasi menjadi salah satu keuntungan utama yang sangat jelas. Peserta yang memiliki jaringan yang kuat cenderung mendapatkan informasi lebih awal dan lebih lengkap mengenai pola seleksi, jenis tes, dan cara persiapan. Selain itu, dukungan moral, panduan teknis, serta legitimasi simbolik dari lingkungan sosial dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesiapan mental peserta ketika menghadapi tahapan seleksi. Dalam pandangan Pierre Bourdieu, keadaan ini menunjukkan bahwa proses seleksi calon polisi adalah sebuah arena sosial di mana distribusi modal termasuk modal sosial mempengaruhi posisi dan

peluang individu di dalamnya. Sementara itu, dari perspektif James S. Coleman, jaringan yang didasarkan pada kepercayaan dan norma saling mendukung berfungsi sebagai sumber daya kolektif yang membuat tindakan individu lebih mudah untuk mencapai tujuannya.

Ketiga, perebutan kesempatan dalam seleksi calon polisi menunjukkan adanya dinamika persaingan sosial yang tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan pribadi, tetapi juga oleh latar belakang sosial dan kekuatan jaringan yang dimiliki. Peserta yang memiliki kapital sosial lebih kuat cenderung berada dalam posisi yang lebih baik terkait informasi, dukungan sosial, dan legitimasi simbolik. Di sisi lain, peserta yang tak memiliki jaringan yang kuat harus menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan akses dan kurangnya dukungan strategis. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem seleksi secara formal mendukung prinsip meritokrasi, dalam prakteknya masih terdapat pengaruh struktur relasi yang dapat memperkuat ketimpangan kesempatan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kapital sosial berfungsi sebagai sumber daya strategis dalam proses seleksi calon anggota kepolisian. Kapital sosial tidak hanya membuka akses terhadap informasi dan dukungan, tetapi juga mempengaruhi cara pandang, legitimasi, dan kesiapan peserta dalam arena seleksi. Oleh karena itu, proses seleksi calon polisi di Cipinang dapat dipahami sebagai arena kompetisi sosial yang dipengaruhi oleh distribusi kapital sosial yang tidak seimbang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan dari studi mengenai fungsi kapital sosial dalam proses pemilihan calon anggota Kepolisian Republik Indonesia di Cipinang, Jakarta Timur, Secara institusional, Polri harus terus memperkuat pelaksanaan sistem rekrutmen yang mengedepankan prinsip kejelasan, objektivitas, dan tanggung jawab secara terus-menerus. Informasi mengenai proses seleksi, kriteria penilaian, dan sistem pengawasan harus disebarluaskan dengan lebih transparan dan merata agar semua calon peserta, tidak hanya yang memiliki jaringan tertentu, dapat mengaksesnya. Dengan meningkatkan akses informasi

secara terbuka dan terencana, kesenjangan akibat perbedaan modal sosial bisa dikurangi, sehingga prinsip meritokrasi dapat berfungsi dengan lebih baik.

Selain itu, pengawasan baik dari dalam maupun luar institusi perlu diperketat untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan relasi atau praktik percaloan yang dapat merusak kepercayaan terhadap institusi. Perbaikan sistem rekrutmen hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup pembentukan budaya organisasi yang menekankan kepatuhan dan profesionalisme.

Bagi masyarakat, terutama generasi muda, sangat penting untuk membangun modal sosial yang positif yang terfokus pada nilai kepercayaan, usaha keras, dan integritas, alih-alih sekadar mengandalkan koneksi elit atau hubungan patronase. Jaringan sosial seharusnya dibangun sebagai dukungan yang konstruktif dan produktif, yang mendorong persaingan yang adil serta memperkuat solidaritas di antara masyarakat.

Dari sudut pandang akademis, penelitian ini menawarkan peluang untuk studi lebih lanjut yang bisa mengeksplorasi modal sosial dalam seleksi institusi formal lainnya atau memperluas area penelitian untuk mengevaluasi variasi dinamika sosial di lokasi-lokasi yang berbeda. Penelitian mendatang juga dapat memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang pengaruh modal sosial terhadap distribusi kesempatan di lembaga negara.

Dengan demikian, diharapkan proses pemilihan anggota kepolisian di masa depan dapat mencerminkan prinsip keadilan sosial, pemberian kesempatan yang setara serta profesionalisme institusi yang berlandaskan pada kompetensi, bukan hanya bergantung pada kekuatan jaringan sosial.